

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang meliputi wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024 tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dari partai politik dan faktor eksternal yang berasal dari luar kendali partai politik.

Dari sisi internal, PDI Perjuangan telah menunjukkan komitmen terhadap keterwakilan perempuan, baik melalui pemenuhan kuota minimal 30% dalam daftar calon legislatif maupun penguatan kapasitas kader perempuan melalui pelatihan politik. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek strategis yang menentukan keberhasilan kontestasi politik elektoral. Penempatan nomor urut yang kurang kompetitif serta distribusi logistik dan sumber daya kampanye yang belum merata masih menjadi tantangan utama. Dalam praktiknya, komitmen afirmatif yang ditampilkan partai sering kali bersifat simbolik dan belum mampu mendorong peningkatan angka keterpilihan secara signifikan.

Salah satu strategi kemenangan suara yang digunakan oleh PDI Perjuangan, yakni sistem komandante, mekanisme pengorganisasian pemilih secara terstruktur melalui pembagian wilayah tempur dan dipimpin oleh seorang komandante, meski secara konsep dirancang untuk membangun komunikasi dua arah antara caleg dan

pemilih, memperkuat basis dukungan akar rumput, serta menciptakan penggalangan suara yang lebih konsisten dan terukur, dalam kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak maksimalnya pemahaman dari caleg sendiri hingga struktur paling bawah, beserta lemahnya kontrol terhadap sistem komandante membuat strategi ini menjadi tidak efektif. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem komandante ini menghilangkan basis pemilih tradisional caleg sebelumnya dan menimbulkan sentimen negatif pemilih terhadap sistem internal partai yang dianggap mencederai demokrasi. Alih-alih memberdayakan caleg perempuan, sistem komandante dalam pelaksanaannya justru mengukuhkan dominasi struktur lama yang tidak berpihak pada kesetaraan elektoral.

Dari sisi eksternal, politisi perempuan menghadapi serangkaian hambatan struktural dan kultural yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pertama, sistem pemilu di Indonesia yang menggunakan metode proporsional terbuka menuntut caleg perempuan untuk bersaing secara personal dalam memperoleh suara terbanyak. Sistem ini cenderung menguntungkan kandidat yang memiliki sumber daya dan jaringan kampanye yang luas, dimana dalam banyak kasus lebih mudah diakses oleh laki-laki. Caleg perempuan dengan seluruh keterbatasannya masuk dalam arena kompetisi politik yang tidak setara, yang mengakibatkan meski ia masuk dalam daftar calon, ia tetap tereduksi oleh beban sistemik yang tidak berpihak.

Kemudian, persepsi pemilih yang dioperasi pun juga dipengaruhi oleh banyak stimulan, seperti politisasi bansos dan pandangan konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik tidak hanya terbentur

oleh aspek struktural, namun juga secara kultural yang membentuk dasar preferensi politik pemilih. Terakhir, hambatan juga datang dari minimnya cakupan media terhadap politisi perempuan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya caleg perempuan hampir tidak mendapatkan eksposur media. Jikapun ada, skalanya sangat terbatas. Padahal, dalam sistem pemilu terbuka yang menuntut popularitas, visibilitas media menjadi elemen penting dalam membangun dukungan elektoral. Ketimpangan ini membuat politisi perempuan semakin terpinggirkan dari ruang publik, pun juga menghambat elektabilitas yang kemudian beresiko melemahkan posisi caleg perempuan dalam narasi politik lokal.

Dari keseluruhan temuan, tampak bahwa angka keterpilihan politisi perempuan dari PDI Perjuangan di Kota Semarang mengalami penurunan sebanyak 50%. Jika pada tahun 2019 terdapat enam politisi perempuan, maka pada tahun 2024 hanya tiga yang terpilih, dan ketiganya adalah petahana dengan keunggulan memiliki basis pemilih sebelumnya (*existing voter base*).

4.2. Saran

Melihat temuan-temuan di atas, maka diperlukan perbaikan menyeluruh dari hulu ke hilir. Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Reformasi Internal Partai Politik

Partai politik perlu melakukan reformasi internal yang mencakup perbaikan dalam hal distribusi sumber daya kampanye yang lebih adil bagi calon legislatif perempuan. Selain itu, pemetaan strategis dalam penempatan nomor urut harus mempertimbangkan potensi elektoral,; bukan sekedar kedekatan struktural. Penguatan jaringan internal partai

juga perlu diarahkan secara inklusif agar dapat mengakomodasi caleg perempuan, khususnya mereka yang memiliki pola dukungan lintas wilayah yang kerap tidak terjangkau oleh pola kerja struktural partai yang kaku.

2. Evaluasi Sistem Komandante

Sistem komandante sebagai salah satu strategi internal partai perlu dievaluasi secara mendalam. Meskipun secara teori sistem ini dapat memperkuat basis suara, dalam praktiknya sistem ini hanya efektif bagi caleg yang memiliki konsentrasi suara dalam satu wilayah. Bagi caleg perempuan yang cenderung memiliki pola dukungan yang tersebar, sistem ini justru tidak adaptif dan dapat merugikan. Oleh karena hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme kerja komandante agar lebih fleksibel dan mampu menjangkau model dukungan yang beragam.

3. Penguatan Regulasi Afirmatif oleh Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif yang telah ada dengan menambah pengawasan yang lebih ketat. Upaya afirmasi seperti kuota 30% keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administratif semata, tetapi harus diiringi dengan strategi konkret untuk meningkatkan keterpilihan. Pengawasan oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga perlu diperluas agar menyentuh aspek substansi dan *outcome* dari kebijakan afirmatif tersebut.

4. Perubahan Narasi Media

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap politisi perempuan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam konstruksi narasi media, dari yang bersifat simbolik atau stereotipikal menuju pemberitaan yang lebih substantif dan adil gender. Narasi pemberitaan hendaknya difokuskan pada kapasitas politik, pengalaman, serta visi misi caleg perempuan, bukan pada atribut biologis atau peran domestik yang justru mempersempit makna partisipasi politik perempuan.

5. Peningkatan Literasi Politik Masyarakat

Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Untuk itu, peningkatan literasi politik menjadi hal yang sangat mendesak. Masyarakat harus didorong untuk menjadi pemilih yang kritis dan memahami pentingnya representasi yang setara. Pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan berbasis kesadaran kolektif akan menjadi kunci untuk melawan politik transaksional dan membentuk demokrasi yang lebih sehat dan inklusif terhadap perempuan.